STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI SULAWESI TENGGARA

SKRIPSI

OLEH:

INDRIYANI M
1622080186

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN
JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2020

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI, SULAWESI TENGGARA

SKRIPSI

Oleh:

INDRIYANI M
1622080186

Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Mukhlisa A. Ghaffar, S.Pi., M.Si	**Erna, S.Pi., M.Si**
NIP. 19731119 199702 2 001	NIP. 19721213 199702 2 001

Mengetahui

Direktur,	Ketua Jurusan,
Dr. Ir. H. Darmawan, MP	**Syamsu Marlin Amir, ST., M.Si**
NIP. 19670202 199803 1 002	NIP. 19790501 200501 1 001

Tanggal Lulus : 26 Agustus 2020

ii

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Standar Pelayanan Penerbian Surat Persetujuan Berlayar di Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara.

Nama : Indriyani. M

Nim : 1622080186

Program Studi : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Jurusan : Teknologi PenangkapanIkan

Menyetujui,
Tim Penguji :

1. Mukhlisa A. Ghaffar, S.Pi., M.Si (.....)
2. Erna, S.Pi, M.Si (.....)
3. Siti Muslimah Bachrum, S.Pi, M.P (.....)
4. Hasmawati, S.Pi., M.Si (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Sitti Muslimah Bachrum, S.Pi., MP
NIP. 19710605 199703 2 001

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, 12 Juni 2020
Yang Menyatakan

Indriyani M

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Terapan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Abd. Mustalib dan ibunda Nursiah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Dr. Ir. H. Darmawan, M.P, selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Bapak Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si, selaku Ketua Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan.
4. Ibu Sitti Muslimh Bachrum, S.Pi., MP, selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
5. Ibu Mukhlisa A. Ghaffar, S.Pi., M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Erna, S.Pi., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan berkenan memberikan

tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ir. Mansur, MM, selaku Pimpinan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah bersedia menerima penulis dengan baik.
7. Bapak Yulian Toni S.St.Pi., selaku Pembimbing Lapangan yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan serta memberikan tambahan ilmu kepada penulis selama berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.
8. Bapak Isra, SE dan keluarga yang telah banyak memmbantu dan mengarahkan penulis dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian serta banyak memberikan dukungan kepada penulis.
9. Ibu Debi Hartati. S.Pd yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam pengumpulan data-data terkait penelitian serta membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis selama berada di lokasi.
10. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis.Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang pelabuhan perikanan.

Pangkep, 02 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan Penelitian 2

1.4 Manfaat Bagi Peneliti 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Pelabuhan Perikanan 4

2.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 4

2.3 Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan 7

2.4 Pelayanan Publik 8

2.5 Standar Pelayanan Publik 8

2.6 Konsep Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar 9

2.7 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat 12

BAB III METEDOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat 13

3.2 Metode Penelitian 13

3.3 Fokus Penelitian 13

3.4 Sumber Data 14
3.5 Teknik Pengumpulan Data 15
3.6 Analisis Data 17

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI

4.1 Lokasi PPS Kendari 19
4.2 Sarana dan Prasarana 20
4.3 Struktur Organisasi 21
4.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pelabuhan 23
4.5 Fasilitas Pelabuhan 24
4.5.1 Fasilitas Pokok 24
4.5.2 Fasilitas Fungsional 25
4.5.3 Fasilitas Penunjang 26

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedur Pelayanan 27
5.2 Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 30
5.3 Waktu Penyelesaian 34
5.4 Produk Pelayanan 35
5.5 Biaya Pelayanan 35
5.6 Kompetensi Petugas Pelayanan 36
5.7 Faktor Pendukung dan Penghambat SPB 37
5.7.1 Faktor Pendukung 37
5.7.2 Faktor Penghambat 38

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 40
6.2 Saran 40

DAFTAR PUSTAKA..... 14

LAMPIRAN 14

RIWAYAT HIDUP..... 14

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Lay Out PPS Kendari 20

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PPS Kendari 22

Gambar 5.1 SOP Penerbitan SPB PPS Kendari 28

Gambar 5.2 Aplikasi Teman SPB PPS Kendari 30

Gambar 5.3 Alur Pelayanan SPB PPS Kendari 35

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Fasilitas Pokok 24

Tabel 4.2 Fasilitas Fungsional PPS Kendari..... 25

Tabel 4.3 Fasilitas Penunjang PPS Kendari 26

Tabel 5.1 Penerbitan SHTI, STBL Kedatangan/Keberangkatan, SPB, dan Logbook PPS Kendari 35

Tabel 5.2 Pendidikan Pegawai Kesyahbandaran PPS Kendari 38

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 44

ABSTRAK

Indriyani M, 1622080186, Standar Pelayanan Penerbian Surat Persetujuan Berlayar di Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh **Mukhlisa A. Ghaffar** dan **Erna**.

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ke giatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat standar pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kesyahbandaran PPS Kendari. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Maret 2020 di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu mengolah data yang diperoleh sehingga didapat gambaran proses pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Hasil penelitian adalah Pelayanan penerbitan SPB yang diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran PPS Kendari berjalan dengan baik dan prosedur penerbitan SPB sudah sesuai dengan Permen KP No.03/MEN/2013. Faktor pendukung adalah sumber daya manusia serta sarana dan lokasi Kantor Kesyahbandaran PPS Kendari yang strategis, sedangkan faktor penghambat dalam pelayanan penerbitan SPB adalah jaringan internet yang sering terganggu, pengurus/pemilik kapal masih sering lalai dalam pengecekan kelengkapan dokumen, dan pengurus kapal perikanan tidak memiliki legalitas formal atau badan hukum.

Kata kunci : Standar Pelayanan, Surat Persetujuan Berlayar, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

ABSTRACT

Indriyani M, 1622080186, *Service Standards for the Issuance of Sailing Approval Letter at the Harbormaster of the Kendari Ocean Fishing Port, Southeast Sulawesi*. Supervised by Mukhlisa A. Ghaffar and Erna

Fishery port is a place consisting of land and waters around it with certain boundaries as a place for government activities and fishery business system activities which are used as a place for fishing boats to dock, anchor and/or load and unload fish equipped with safe facilities for shipping and activities. supporting fisheries.

The purpose of this research is to analyze the procedures for the Issuance of Sailing Approval Letter and to find out the supporting factors and obstacles to the service standard of Sailing Approval Letter Issuance at the Kendari Ocean Fishing Post of the harbormaster. This research was conducted from 20th January to 20th March 2020 at the Kendari Ocean Fishing Port. The types of data used were primary data and secondary data. The method of analysis used was descriptive method that processing the data obtained so that an overview of the service process of Sailing Approval Letter was found.

The result of the research was that the Sailing Approval letter issuance service provided by the Kendari Ocean Fishing Port of Harbormaster office was running well and the procedure of its issuance was in accordance with Marine and Fisheries Government Regulation No. 03 / MEN / 2013. Supporting factors were human resources as well as facilities and strategic location of Harbormaster Office of the Kendari Ocean Fishing Port, while the inhibiting factor in Sailing Approval Letter (SAL) issuance services was the internet network which was often disrupted, ship management / owners were often negligent in checking the completeness of documents, and fishing boat managers did not have formal legality or legal entity.

Keywords: Service Standards, Sailing Approval Letter, Kendari Ocean Fishing Port

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pelayaran merupakan peranan penting dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan Ketahanan Nasional diperlukan Sistem Pelayaran Nasional untuk mendukung pertumbuhanekonomi, pengembangan wilayah dan memperkukuh kedaulatan negara.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran, Melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran Perikanan. Pemerintah secara tidak langsung menangani kegiatan pelayaran di Indonesia. Hal ini selaras dengan bunyi Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu pembinaan yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 ayat (2) adalah fungsi pengaturan, yakni meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penetuan norma, standar, pedoman, kinerja, perencanaan, dan prosedur termasuk, persyaratan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perizinan.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis karena berada di Teluk Kendari yang relatif aman dari gelombang Laut Banda yang sangat besar pada

saat angin timur, serta beradadi Wilayah Pengelolan Perikanan (WPP) 714 yang mempunyai potensi sumberdaya ikan yang besar terutama untuk jenis ikan pelagis. Selain itu Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berada di daerah yang kondusif serta tidak kalah penting adanya dukungan dari Pemerintah Daerah baik dari Provinsi maupun dari Pemerintah Kota Kendari.

Semenjak diresmikan pada tahun 1990 kegiatan operasional PPS Kendari setiap tahun terus menunjukkan perkembangan yang meningkat, berdasarkantujuh indikator operasinal yang meliputi : produksi ikan, kunjungan kapal, penyaluran es, penyaluran BBM solar, penyaluran air bersih, penyerapan tenaga kerja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir tahun 2020 target operasional PPS Kendari mencapai 132,08 % dari target yang ditetapkan. (PPS Kendari, 2020). Hal ini juga menjadikan mayoritas masyarakatnya menggunakan jasa angkutan laut sebagai sarana untuk mata pencaharian para nelayan, dan tentu saja semua itu membutuhkan sistem pelayaran yang baik. Kantor Kesyahbandaran Kendari mempunyai peran penting dalam mewujudkan hal itu. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar"

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran PPS Kendari?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran PPS Kendari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran PPS Kendari.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat standar pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Ber;ayar pada Kantor Kesyahbandaran PPS Kendari.

1.4 Manfaat bagi Peneliti

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan bagi instansi terkait khususnya Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
2. Memberikan informasi tentang standar pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar pada kantor kesyahbandaran PPS Kendari.

BAB II

TINJAUANPUSTAKA

2.1 DefinisiPelabuhanPerikanan

Pelabuhan perikanan digolongkan sebagai pelabuhan khusus, yang mengandung pengertian bahwa suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dilengkapi dengan fasilitas, sejak ia di daratkan sampaiikan di distribusikan. Pelabuhan perikanan dilihat dari aspek aktivitas perikanan tangkap disebutkan bahwa pelabuhan perikanan adalah suatu pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan, dan pemasaran baik lokal, nasional maupun internasional (Lubis, 2006).

Menurut PeraturanMenteriKelautan dan Perikanantahun 2006,Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentusebagaitempatkegiatan pemerintahan dankegiatan sistembisnis perikananyang dipergunakansebagaitempatkapalperikanan bersandar, berlabuhdanataubongkar muatikanyangdilengkapi denganfasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjangpelabuhan perikanan.

1.2 KlasifikasiPelabuhan

Menurut Triatmodjo (1992), Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam segi tinjauan, yaitu segi penyelenggaraannya, segi pengusahaannya, fungsi dalam perdagangan nasional dan internasional, segi kegunaan dan letak geografisnya.

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikenal sebagai pelabuhan perikanan tipe A yang juga disebut sebagai pelabuhan perikanan kelas I. Menurut PeraturanMenteriKelautan danPerikananNomor:Permen KP08/MEN/2012tentang Pelabuhan Perikanan (KKP RI, 2012),PelabuhanPerikananSamudera(PPS) memilikikriteria sebagai berikut:

a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut Teritorial, Zona Ekonomi Eklusif Indonesia, dan Laut Lepas;
b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT.
c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya3 m;
d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan ataaujumlah keseluruhansekurang-kurangnya6.000GT kapal perikanan sekaligus;
e. Ikanyangdidaratkan sebagian untuk diekspor;
f. Terdapat industri perikanan.

2. Pelabuhan PerikananNusantara (PPN)

Menurut Pelabuhan Perikanan Nusantara(PPN) dikenalsebagai pelabuhan perikanan tipe B yang juga disebut sebagai pelabuhan perikanan kelas II.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Permen KP 08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan(KKP RI, 2012), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia;
b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m,dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 m;
d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus
e. Ikan yang didaratkan sebagian untuk diekspor;

3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pelabuhan Perikanan Pantai(PPP) dikenal sebagai pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai(PPP) Berikut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) diIndonesia. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:Permen KP08/MEN/2012 tentang pelabuhan perikanan (KKP RI, 2012), Pelabuhan Perikanan Pantai(PPP) memiliki kriteria sebagai berikut: Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial:

a. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT.

b. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 2 m
c. Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan ataau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus

4. Pangkalan PendaratanIkan (PPI)

Pangkalan PendaratanIkan (PPI) dikenal sebagai pelabuhan perikanan tipe D. Pelabuhan ini dikelola oleh daerah untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan didaerah pantai. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor: Permen KP08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan (KKP RI, 2012),Pangkalan PendaratanIkan (PPI).

a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di Indonesia;
b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
d. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 kapal perikanan ataau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75, ;dan
e. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

2.3 Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan

Fungsi pelabuhan perikanan ditinjau dari segiaktivitasnya merupakan kegiatan ekonomi perikanan baik ditinjau dari aspek pendaratan dan

pembongkaran ikan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan.Tingkat keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan di indikasikan dengan terealisasi atau tidaknya fungsi pelabuhan perikanan secaraoptimal. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan merupakan tempat yang memiliki berbagai fasilitasyang berguna didalam pelaksanaan fungsi dan peranannya sebagai pelabuhan (Lubis, 2006).

2.4 Pelayanan Publik

Moenir (2006:26), mengemukakan bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui system, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sinambela (2006:5) berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik (pelayanan umum) dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.5 Standar Pelayanan Publik

Menurut Mahmudi dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik (2013:230) ”Standar Pelayanan merupakan ukuran atau persyaratan baku yang harus

dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi pelayanan (pemerintah) dan atau pengguna pelayanan (masyarakat)".

Selanjutnya dikatakan bahwa Standar Pelayanan Publik sekurang-kurangya harus meliputi :

1) Prosedur Pelayanan
2) Waktu Penyelesaian
3) Produk Pelayanan
4) Biaya Pelayanan
5) Sarana dan Prasarana
6) Kompetensi Petugas Pelayanan

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 7 , bahwa Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (DPR RI, 2009).

2.6 Konsep Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Menurut Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 1 ayat 2, Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya (DPR RI, 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1, Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan

Berlayar (*Port Clearance*). Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (Kementerian Perhubungan RI, 2010).

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Surat persetujuan berlayar akan dianggap tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan, kapal tidak segera bertolak dari pelabuhan. Surat persetujuan berlayar dapat ditunda penerbitannya oleh Syahbandar apabila ternyata kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau terdapat pertimbangan cuaca buruk yang dapat menggangu keselamatan dan keamanan pelayaran (DPR RI, 2009).

Permen KP No.03/MEN/2013 (KKP RI, 2013)tentang kesyahbandaran pelabuhan perikanan mengatur tentang persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu :

1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhanperikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkapersyaratan:

a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (MaSailing Declaration); dan

b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:

a) Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan;

b) Bukti Pembayaran Retribusi Lelang Ikan;

c) Bukti Pembayaran Jasa Kebersihan Kapal;

d) Persetujuan Bea Dan Cukai;

e) Persetujuan Imigrasi;

f) Persetujuan Karantina Kesehatan;

g) Persetujuan Karantina Ikan;

h) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;

i) Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal;

j) Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal;

k) Perjanjian Kerja Laut Atau Daftar Nakhoda Dan ABK

l) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan

m) surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau

b. mengirimkan secara elektronik.

3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.7 Faktor-Faktor penghambat dan pendukung.

Apriyani (2017), menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta, termasuk penerbitan surat persetujuan berlayar adalah：

a. Tenaga Kerja/Pegawai
b. Jam Kerja
c. Anggaran Pengelolaan
d. Gaya kepemimpinan
e. Kehadiran
f. Lingkungan Kerja

BAB III
METODOLOGI

3.1 WaktudanTempat

Pengambilan data dilaksanakan dari bulan Januari sampai Maret 2020, bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, yang terletak di Kel. Puday, Kec. Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln 2007, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsini 2005, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan begitu peneliti akan berusaha menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah :

- SOP pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) di PPS Kendari berdasarkan Permen 03/MEN/2013 tentang kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
- Standar Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, meliputi :

a. Prosedur Pelayanan.
b. Waktu Penyelesaian
c. Produk Pelayanan
d. Biaya Pelayanan
e. Kompetensi Petugas Pelayanan

- Faktor pendukung dan penghambat Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

3.4 Sumber Data

Jenis data dalam hal ini didapatkan melalui sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
   a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip,dan laporan-laporan.
   b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini penulus menggunakan dua teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling dan Snowball Sampling.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga proses kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data (Moleong 2007). Adapun proses yag di maksud, yaitu :

a. Proses Memasuki Lokasi penelitian (*Getting In*)
b. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting Along*)
c. Mengumpulkan data (*Logging The Data*)
   - Observasi (pengamatan)

     Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang secara umum dikenal dengan pengamatan langsung dilapangan. Menurut Margono dalam Satori dan Komariah (2010) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

     Observasi menurut Moleong (2007) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, prilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan atau observasi menurut Moleong (2007) dapat dikalsifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan cara yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan berperan serta, pengamat melakukan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Namun observasi tanpa berperan serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu megadakan pengamatan.

     Dalam penelitian ini, teknik observasi atau pengamatan yang digunakan adalah observasi tanpa peran serta. Adanya keterbatasan

waktu menyebabkan peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa harus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.

- Interview (Wawancara)

  Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (Nazir, 2009). Adapun Satori dan Komariah (2010) mengungkapkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.

  Selain itu sebelum melakukan wawancara peneliti juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

  a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
  b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
  c. Menjelaskan situasi atau badan yang melaksanakan.
  d. Mempersiapkan pencatatan data wawancara.

  Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan dan rasa curiga informan untuk memberikan keterangan yang jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkaikannya kembali dalam bentuk kalimat (Nazir, 2009).

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Kesyahbandaran PPS Kendari serta Pegawai Bidang Tata Usaha dan juga pemilik/pengurus kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari.

3.6 Analisis Data

Dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data Milles dan Huberman (2007) yaitu pengumpulan data, reduksi atau penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan Data adalah data pertama atau data mentah dikumpulka dalam suatu penelitian.

2. Reduksi Data / Penyederhanaan Data.

   Reduksi Data adalah proses penelitian, memfokuskan penyederhanaan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisa yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.

3. Penyajian Data

   Penyajian Data adalah sekelompok informasi tersusun yang memberikan dasar kepada peneliti untuk melakukan penarikan

   kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat

   membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman

4. Menarik Kesimpulan

   Menarik Kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi.